



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN
DIREKTORAT PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH**

GEDUNG RADIUS PRAWIRO LANTAI 11, JALAN DR. WAHIDIN NOMOR 1 JAKARTA 10710
TELEPON (021) 3511486, FAKSIMILE (021) 3511486, SITUS www.depkeu.go.id

Nomor : Und- 71 /PK.3/2014

17 November 2014

Lampiran : Satu berkas

Hal : Undangan Rapat Koordinasi Pajak Rokok

Yth. Terlampir.

Sehubungan dengan penyaluran Pajak Rokok ke RKUD Provinsi TA 2014 dan estimasi pendapatan Pajak Rokok TA 2015 bagi daerah, kami bermaksud mengundang Saudara untuk hadir dalam acara Rapat Koordinasi Pajak Rokok yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Selasa / 2 Desember 2014

Jam : 09.00 WIB s.d selesai

Tempat : Ruang Rapat Bali
Gedung Radius Prawiro Lantai 9
Jl. Dr. Wahidin No.1, Jakarta 10710

Agenda : 1. Kebijakan umum dan estimasi pendapatan Pajak Rokok TA 2015;
2. Pemanfaatan Pajak Rokok untuk Penegakan Hukum.

Demikian disampaikan, atas kehadiran dan partisipasinya kami ucapkan terima kasih.



Direktur,

Adriansyah
Adriansyah
NIP 195606071984031001

Tembusan:

Direktur Jenderal perimbangan Keuangan.

Jadwal dan Susunan Acara
“Rapat Koordinasi Pajak Rokok 2015”

Waktu (WIB)	Materi Acara	Keterangan
Selasa, 2 Desember 2014		
08.00 -- 08.30	Registrasi Peserta	Panitia
08.30 – 08.45	Pembukaan	Panitia
08.45 – 09.15	Keynote Speech	Direktur Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
09.15 – 09.30	Coffee Break	
09.30 – 10.10	Sesi I Materi : Kebijakan Umum Pajak Rokok TA 2015	Kasubdit Sinduktek PDRD, Direktorat PDRD
10.10 – 10.50	Sesi II Materi : Pemanfaatan Dana Pajak Rokok untuk Penegakan Hukum	Direktur Cukai, Ditjen Bea dan Cukai
10.50 – 11.30	Sesi III Materi : Estimasi Pajak Rokok 2015	Kasubdit PDRD IV, Direktorat PDRD
11.30 – 12.30	Diskusi / Tanya Jawab	Moderator & Narasumber
12.45 – 13.00	Penutupan	Panitia

**Daftar Undangan
Rapat Koordinasi Pajak Rokok**

1. Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara;
2. Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Utara;
3. Sekretaris Daerah Provinsi Jambi;
4. Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi Jambi;
5. Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan;
6. Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan;
7. Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu;
8. Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi Bengkulu;
9. Sekretaris Daerah Provinsi Lampung;
10. Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung;
11. Sekretaris Daerah Provinsi Kep. Bangka Belitung;
12. Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi Kep. Bangka Belitung;
13. Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau;
14. Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi Kepulauan Riau;
15. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta;
16. Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta;
17. Sekretaris Daerah Provinsi Banten;
18. Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi Banten;
19. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat;
20. Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat;
21. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
22. Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
23. Sekretaris Daerah Provinsi D.I. Yogyakarta;
24. Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi D.I. Yogyakarta;
25. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur;
26. Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur;
27. Sekretaris Daerah Provinsi Bali;
28. Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi Bali;
29. Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat;
30. Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat;
31. Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
32. Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
33. Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan;
34. Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan;
35. Sekretaris Daerah Kota Medan;
36. Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kota Medan;
37. Sekretaris Daerah Kab. Bekasi;
38. Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kab. Bekasi;
39. Sekretaris Daerah Kab. Temanggung;
40. Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kab. Temanggung;

41. Sekretaris Daerah Kab. Kudus;
42. Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kab. Kudus;
43. Sekretaris Daerah Kab. Jember;
44. Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kab. Jember;
45. Sekretaris Daerah Kota Kediri;
46. Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kota Kediri;
47. Sekretaris Daerah Kab. Pamekasan;
48. Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kab. Pamekasan;
49. Sekretaris Daerah Kota Surabaya;
50. Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kota Surabaya;